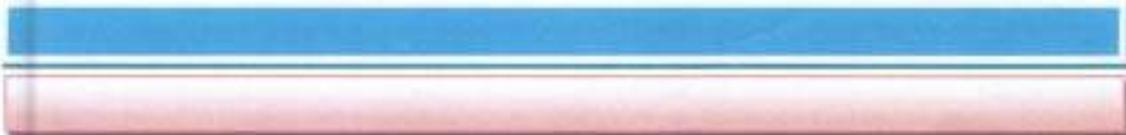


**PERUBAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKULU UTARA  
TAHUN 2021 - 2026**



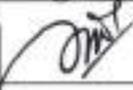
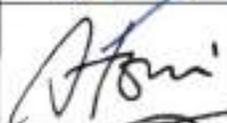
**DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BENGKULU UTARA  
TAHUN 2022**



KEDUA : Menyepakati Rancangan Akhir perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Arga Makmur, 17 Juni 2022

NO	Nama/Nip	Jabatan	Selaku	TandaTangan
<b>A. VERIFIKATOR</b>				
1	Maryosi Efrilina, SE	Kabid Perekonomian dan SDA	Verifikator	
2	Lenda Hayati, SE	Sub Koordinator Sub Bidang SDA	Verifikator	
3	Yetty Oktavia, SP	Sub Koordinator Sub Bidang Ekonomi	Verifikator	
4	Dr. Hendra Depriansyah Putra, M.Pd	Sub Koordinator Sub Bidang Investasi dan Keuangan	Verifikator	
<b>B. PERWAKILAN SKPD</b>				
1.	Sugimin, S.Pd.M.Pd	Kepala Dinas Perikanan Bengkulu Utara	Perwakilan SKPD	
2.	Hardiantoni, SH	Sekretaris Dinas Perikanan Bengkulu Utara	Perwakilan SKPD	
3.	Rodiah Susanti, SE.MM	Perencana Ahli Muda Dinas Perikanan Bengkulu Utara	Perwakilan SKPD	

**Mengetahui,**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA**



**Ir. SUHARTO HANDAYANI**  
NIP. 19660402 199803 1 005

## **KATA PENGANTAR**

Rancangan Akhir perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 – 2026, dirancang sebagai dokumen perencanaan bagi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara agar kegiatan pembangunan daerah bidang perikanan menjadi terpadu, terencana dengan baik, terarah dan efektif, mudah dipantau serta terukur pencapaian hasilnya.

Rancangan Akhir perubahan Rencana Strategis ini menyajikan antara lain pendahuluan, gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan. Selain itu juga menyajikan rencana program kegiatan dan pendanaan serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara.

Dalam penyusunan Rancangan Akhir perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021 –2026 ini tentunya belum sempurna, untuk itu kami mengharapkan adanya masukan yang bersifat membangun untuk perbaikan dalam penyusunan Rancangan Akhir perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 – 2026.

Kepada pihak-pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Rancangan Akhir perubahan Rencana Strategis ini diucapkan terima kasih, semoga Rancangan Akhir perubahan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 – 2026 ini dapat bermanfaat.

Arga Makmur,

2022

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Bengkulu Utara



**SUGMIN, S.Pd, M.Pd**  
Nip. 19661103 198612 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ....	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	18
2.2.1 Kepegawaian .....	18
2.2.1 Sarana dan Prasarana .....	20
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	40
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	42
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	43
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....	49
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia .....	49
3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi .....	59
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	61
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah .....	61
3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	63
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	64
<b>BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	66
<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>69</b>
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>75</b>
<b>BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>99</b>
<b>Bab VIII. PENUTUP .....</b>	<b>101</b>

## DAFTAR TABEL

<b>No</b>		<b>Hal</b>
2.1	Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara menurut Pangkat/Golongan Tahun 2021.....	18
2.2	Data Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara menurut Pendidikan Formal .....	19
2.3	Data Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara menurut Pendidikan Penjenjangan.....	20
2.4	Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara.....	21
2.5	Balai Benih Ikan (BBI) di Kabupaten Bengkulu Utara.....	22
2.6	PPI dan TPI di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021.....	23
2.7	Panjang Pantai Tahun 2021.....	24
2.8	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Bengkulu Utara, 2020 dan 2021.....	25
2.9	Produksi PerikananTangkap Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara (ton), 2020 dan 2021.....	26
2.10	Jumlah Kapal Motor menurut kecamatan Tahun 2020 dan Tahun 2021.....	27
2.11	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Bengkulu Utara, 2020 dan 2021.....	29
2.12	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Bengkulu Utara (Ton), 2021.....	30
2.13	Luas Wilayah Potensi Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Bengkulu Utara (Ha), 2021.....	31
2.14	Data Kecamatan, Kelurahan,Desa Wilayah Pesisir, Kabupaten Bengkulu Utara.....	34
2.15	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Bengkulu Utara....	38
2.16	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan Bengkulu Utara.....	39
4.1	Tujuan dan Sasasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	68
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	72
6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara.....	81
7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Renstra.....	100

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Koordinat geografis Bengkulu Utara di posisi  $2^{\circ}15' - 4^{\circ}$  LS dan  $102^{\circ}32' - 102^{\circ}8'$  BT dengan luas wilayah  $4.424,60 \text{ km}^2$ . Garis pantai yang dimiliki Kabupaten Bengkulu Utara dengan panjang  $262,63 \text{ km}$  yang mempunyai potensi sumber daya pesisir, pantai, dan laut baik hayati maupun nonhayati yang cukup besar berpeluang untuk dapat dikembangkan dan dikelola sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah.

Kondisi tanah di Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari Latasol:  $29,01\%$ , Asosiasi Latosol dan PMK:  $1,42\%$ , Asosiasi MPK dan Lotosol:  $25,36\%$ , Pedsolik Merah Kuning:  $1,16\%$ , aluvial:  $3,15\%$ , Organosol dan lain-lain:  $39,90\%$ . Dari sisi hidrologis, Kabupaten Bengkulu Utara memiliki banyak sungai yang berhulu di sisi timur bukit barisan dan mengalir ke Samudra Indonesia. Diantara sungai-sungai yang ada beberapa sungai yang dapat dilayari oleh kapal dengan bobot mati  $25 \text{ ton}$ .

Kondisi geografisnya sebagian besar merupakan dataran dengan ketinggian dibawah  $150 \text{ m dpl}$  terdapat di bagian barat membujur searah pantai dari selatan ke utara, sedangkan di bagian timur topografinya berbukit-bukit dengan ketinggian  $541 \text{ m dpl}$ .

Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari  $19$  (sembilan belas) Kecamatan yang terbagi menjadi  $215$  (Dua Ratus Lima Belas ) Desa dan  $5$  (Lima) Kelurahan.

Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai wilayah laut dengan panjang pantai 262,63 km, 40 desa pesisir, dan 2.436 orang nelayan dengan potensi perikanan laut sekitar 13.060,30 ton. Kabupaten yang mempunyai satu pulau besar dan beberapa pulau kecil dengan sumberdaya hayati seperti ikan, udang, moluska, kepiting, rumput laut, hutan bakau, karang, padang lamun, penyu, dan biota lainnya.

Selain potensial di bidang perikanan hasil laut, Kabupaten Bengkulu Utara juga terkenal sebagai penghasil perikanan air tawar terbesar di Provinsi Bengkulu. 40 % total produksi ikan air tawar Provinsi Bengkulu adalah dari Bengkulu Utara. Sentra perikanan air tawar di Bengkulu Utara adalah di Kecamatan Padang Jaya dan telah ditetapkan sebagai kawasan Mina Politan perikanan air tawar.

Potensi tersebut apabila tidak dikelola dengan baik, maka tidak akan dapat membawa manfaat bagi masyarakat pesisir maupun daerah. Nelayan akan dapat bekerja dengan baik dan pendapatannya akan meningkat apabila sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan nelayan tersedia mencukupi dan biaya produksinya lebih rendah dibandingkan pendapatan dan produksi.

Pengelolaan sumber daya perikanan perlu ditingkatkan terus menerus untuk menopang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan demi kemakmuran masyarakat Bengkulu Utara yang sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Mengingat besarnya peranan bidang perikanan di Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan bagian integral dari pembangunan di Bengkulu Utara dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka

diperlukan rencana strategis 5 (lima) tahun kedepan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara dalam upaya peningkatan kinerja baik jangka pendek, menengah dan panjang.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum Rancangan Akhir perubahan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan nasional dan daerah yang meliputi :

- a. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);*
- b. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);*
- c. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);*
- d. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan*

- Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan, dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
  - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah
  - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 2);
  - j. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara; (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomo

3 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 3);

k. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 61);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **Maksud**

Penyusunan Rancangan Akhir perubahan Rencana Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 – 2026 dimaksudkan sebagai arah kebijakan pembangunan perencanaan jangka menengah (5 tahunan) dalam perumusan rencana strategis Dinas Perikanan dalam mendukung misi ke 3 (tiga) Kepala Daerah yaitu “Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Ekonomi Kerakyatan”.

#### **Tujuan**

Tujuan Dinas Perikanan dalam Penyusunan Rencana Strategis :

- a. Mengidentifikasi, menganalisa dan merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.
- b. Memberikan batasan dalam program perencanaan pembangunan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perikanan di Kabupaten Bengkulu Utara.

c. Memberikan informasi arah kebijakan dan program perencanaan perikanan.

d. Sebagai alat pengendali dan evaluasi pencapaian kinerja 5 tahun ke depan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Rancangan Akhir Rencana Strategis disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra dengan susunan garis besar isi dokumen terdiri dari :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi / kabupaten / kota, dan Renja Perangkat Daerah.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

### BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

#### 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih operasional.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat daerah.

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Keberadaan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara diatur berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 61). Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara adalah Dinas Perikanan Tipe B yang merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perikanan yang menjadi kewenangan kabupaten.

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten, memimpin, merencanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan, menyelenggarakan serta merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kewenangan kesekretariatan dan bidang pada Dinas Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perikanan;
- b. pengkoordinasian program dan kegiatan;
- c. pelaksanaan urusan pelayanan umum dibidang perikanan;
- d. pelaksanaan dan pembinaan tugas kesekretariatan Dinas Perikanan;
- e. pelaksanaan dan pembinaan tugas dibidang perikanan;
- f. pengendalian kebijakan teknis, program dan kegiatan;
- g. evaluasi dan pelaporan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**a. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 60 Tahun 2016 tanggal 10 Desember 2016, susunan organisasi tersebut seperti di bawah ini :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, membawahi:
  - a. Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Nelayan
  - b. Seksi Fasilitas dan Data Kenelayanan
  - c. Seksi Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Kemitrausahaan
4. Bidang Perizinan dan Pembinaan Pelaku Usaha, membawahi :

- a. Seksi Perizinan Usaha Perikanan, Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup
  - b. Seksi Teknologi dan Peningkatan Mutu Produk
  - c. Seksi Data, Informasi dan Pembinaan Kelembagaan.
5. Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan, membawahi :
- a. Seksi Perencanaan Kawasan, Fasilitas, dan Data Budidaya
  - b. Seksi Pengelolaan Air, Lahan, Kesehatan Ikan dan Mutu Pakan
  - c. Seksi Produksi Budidaya dan Pembenihan.
6. Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari:
- a. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Lubuk Durian
  - b. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pagar Mas Kuro Tidur
7. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari:
- a. Jabatan Fungsional Keahlian
  - b. Jabatan Fungsional Keterampilan

## **b. Tugas Pokok Dan Fungsi**

### **1. Sekretariat**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan aset dan urusan kepegawaian.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. Koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran dinas
  - b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dinas
  - c. Pengkoordinasian penyusunan laporan yang meliputi laporan kinerja aparatur, laporan akuntabilitas kinerja dinas dan laporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran dinas
  - d. Pembinaan dan pemberian dukung administrasi yang meliputi ketata-usahaan, kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan, kerumah-tangga, kerja sama, humas dan keprotokoleran, kearsipan dan perpustakaan, serta informasi publik
  - e. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
  - f. Penyelenggaraan urusan hukum dan peraturan perundang-undangan
  - g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik Negara/ daerah dan layanan pengadaan barang/jasa
  - h. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan setiap sub bagian lingkup sekretariat dan

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

## **2. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil**

- (1) Bidang pemberdayaan nelayan kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 pada ayat (3) mempunyai tugas pokok menyiapkan dan menghimpun bahan perumusan rencana program dan kegiatan, pengolahan data dan informasi serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemberdayaan nelayan kecil menyelenggarakan fungsi :
  - a. Melaksanakan perencanaan, penyusunan program dan kegiatan
  - b. Melaksanakan pengolahan data dan informasi
  - c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

## **3. Bidang perizinan dan pembinaan pelaku usaha**

- (1) Bidang perizinan dan pembinaan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 pada ayat (4) mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengkoordinasi, merumuskan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan, penerbitan SIUP :

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perizinan dan pelaku usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan, penyelenggaraan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kepada pelaku usaha dan peningkatan mutu produk meliputi analisa usaha, fasilitas kerjasama atau kemitraan usaha serta pembinaan dan bimbingan teknologi dalam peningkatan mutu
- b. Perumusan, penyelenggaraan, evaluasi seta pelaporan pelaksanaan penerbitan perizinan usaha perikanan tanda pencatatan kapal pengangkut ikan hidup (TPKPIH)
- c. Perumusan, penyelenggaraan, evaluasi seta pelaporan pelaksanaan informasi penyiapan bahan kebijakan kelembagaan dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

#### **4. Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan**

- (1) Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 pada ayat (5) mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengkoordinasi, merumuskan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan, penyelenggaraan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan
- b. Perumusan, penyelenggaraan, evaluasi serta pelaporan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidayaan ikan
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

#### **5. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 pada ayat (7) adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Kepegawaian

Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara per Desember 2021 adalah 28 Orang, dengan rincian sebagai berikut :

#### a. Kepangkatan / Golongan

Jumlah PNS Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Menurut Pangkat/ Golongan Tahun 2021 :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara menurut Pangkat/Golongan Tahun 2021

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Golongan IV	7 orang	
2	Golongan III	19 orang	
3	Golongan II	2 orang	
4	Golongan I	-	

#### b. Pendidikan

Data Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara menurut pendidikan :

a. Pendidikan Formal

Tabel 2.2 Data Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara menurut Pendidikan Formal

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Strata 3 (S3)	-	
2	Strata 2 (S2)	2	
3	Strata 1 (S1)/Diploma IV (D-IV)	20	
4	Diploma III (D-III)	2	
5	Diploma II (D-II)	-	
6	Diploma I (D-I)	-	
7	SLTA	4	
8	SMP	-	
9	SD	-	
	Jumlah	28	

b. Pendidikan Penjenjangan :

Pada tahun 2021 Dinas Perikanan tidak menganggarkan untuk pendidikan Penjenjangan Diklatpim dikarenakan keterbatasan anggaran akibat wabah covid-19. Jadi hingga Januari 2021 Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara yang telah mengikuti

Pendidikan Penjurangan berjumlah 3 orang dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.3 Data Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara menurut Pendidikan Penjurangan

No	Jenis Pendidikan Penjurangan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	SPATI	-	
2	Spamen/Diklatpim II		
3	Spama/Diklatpim III	1	
4	Spada/Adum/Diklatpim IV	2	
	Jumlah	3	

## 2.2.2 Sarana dan Prasarana

### a. Sarana dan Prasarana Sekretariat Dinas Perikanan

Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara.

#### 1. Gedung Kantor

Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara sekarang kondisi gedung sangat baik dan suasana kerja yang nyaman dapat meningkatkan kinerja dinas.

#### 2. Rumah Dinas

Rumah Dinas Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara dibangun pada tahun 2010 yang berlokasi di sebelah Kantor Dinas Perikanan Bengkulu Utara.

### 3. Fasilitas Kerja

Fasilitas kerja pada Dinas Perikanan Bengkulu Utara berupa meubeler dan komputer sudah mencukupi.

### 4. Fasilitas Kendaraan

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara hingga akhir Tahun Anggaran 2021 memiliki kendaraan dinas sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) unit yang terdiri dari : kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 6 (enam) unit, kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 29 unit, kendaraan roda 3 (tiga) sebanyak 2 (dua) unit.

Tabel 2.4 Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara

No	Uraian	Jumlah (unit)	Kondisi Sarana dan Prasarana			
			Baik (unit)	Sedang (unit)	Rusak Ringan (unit)	Rusak Berat (unit)
1	Gedung Kantor	1	1	-	-	-
2	Kendaraan roda 4	6	4	-	-	2
3	Kendaraan Roda 2	29	29	-	-	-
4	Kendaraan Roda 3	2	-	-	-	2
5	Komputer/notebook	25	10	-	-	15
6	Aset Lainnya: Antena pemancar Radio HT	-	-	-	-	-

### **b. Sarana dan Prasarana pada Bidang Perikanan Budidaya**

Di Kabupaten Bengkulu Utara terdapat 7 unit Balai Benih Ikan yang terdiri 6 (enam) unit BBI Lokal dan 1 unit BBI sentral. Dari 7 unit BBI tersebut hanya 2 (dua) BBI yang kewenangan pengelolaannya dibawah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara yaitu BBI Pagar Mas dan BBI Lubuk Durian. Daftar Balai Benih Ikan di Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Balai Benih Ikan (BBI) di Kabupaten Bengkulu Utara

No	Nama BBI	Lokasi	Luas Areal (Ha)	Keterangan
		Kecamatan		
1.	BBI Pagar Mas	Arga Makmur	3,5	DKP. Kab. BU
2.	BBI Lubuk Durian	Kerkap	1,0	DKP. Kab. BU
3.	BBAT Marga Sakti	Padang Jaya	5,0	DKP. Prop BKL
4.	BBI BL-9 Unit 1	Padang Jaya	1,0	DKP. Prop BKL
5.	BBI Unit 1	Padang Jaya	1,0	DKP. Prop BKL
6.	BBI Arga Makmur	Arga Makmur	0,8	DKP. Prop BKL
7.	BBI Tl. Congok	Arga Makmur	0,8	DKP. Prop BKL

### **c. Sarana dan Prasarana pada Bidang Penangkapan Ikan**

Pada Bidang Penangkapan Ikan terdapat 7 unit Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan 2 Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yaitu PPI Muara Sungai Ketahun di Kecamatan Ketahun dan PPI Air Napal di Kecamatan Air Napal. Adapun 7 unit TPI

tersebut yaitu TPI Banjar Sari, TPI Karang Pulau, TPI Serangai, TPI Kota Bani dan TPI Pasar Sebelat, TPI Lubuk Tanjung (rusak berat) dan TPI Kahyapu (tidak dapat difungsikan). Berikut Tabel PPI dan TPI di Kabupaten Bengkulu Utara:

Tabel 2.6 PPI dan TPI di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021

No	Nama PPI dan TPI	Lokasi	Keterangan
1.	PPI Muara Ketahun	Kec. Ketahun	Baik
2.	PPI Air Napal	Kec. Air Napal	Baik
3.	TPI Pasar Sebelat	Kec. Putri Hijau	Rusak
4.	TPI Lubuk Tanjung	Kec. Air Napal	Rusak
5.	TPI Kahyapu	Kec. Enggano	Berat
6.	TPI Karang Pulau	Kec. Putri Hijau	Baik
7.	TPI Serangai	Kec. Batik Nau	Baik
8.	TPI Kota Bani	Kec. Putri Hijau	Baik
9.	TPI Banjar sari	Kec. Enggano	Baik

Sumber daya Dinas Perikanan dilihat dari bidang Kegiatan :

### 1. Profil Perikanan Tangkap

Sumber daya kelautan Kabupaten Bengkulu Utara memiliki keanekaragaman yang tinggi, baik jenis dan potensinya. Potensi sumberdaya tersebut ada yang dapat di perbarui seperti perikanan. Potensi sumber daya kelautan di Kabupaten Bengkulu Utara belum sepenuhnya termanfaatkan karena masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada seperti sarana penangkapan yang masih berskala perikanan rakyat dan jumlah TPI serta PPI masih terbatas.

Namun dalam eksplorasi dan eksploitasinya masih jauh dari potensi optimal yang dapat dilakukan. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan faktor pendukung lainnya dalam memacu percepatan

pemanfaatan potensi. Dengan potensi yang tersedia untuk Kabupaten Bengkulu Utara masih perlu ditingkatkan bila dilihat dari panjang pantai yang dapat dilihat pada di bawah ini.

Tabel 2.7. Panjang Pantai Tahun 2021

No	Kecamatan	Panjang Pantai (Km)
1	Kec. Air Napal	15,5
2	Kec. Air Besi	3,0
3	Kec. Lais	11,6
4	Kec. Batik Nau	14,0
5	Kec. Ketahun	39,1
6	Kec. Putri Hijau	38,8
7	Kec. Enggano	123,43
Jumlah		245,43

Secara normatif masyarakat nelayan seharusnya merupakan masyarakat yang sejahtera karena sumberdaya alam sangat tinggi. Namun kenyataannya masih tertinggal dibandingkan dengan kelompok lainnya. Salah satu penyebabnya adalah harga ikan hasil tangkapan para nelayan tidak stabil dan cenderung rendah serta merugikan nelayan karena adanya permainan tengkulak. Kondisi ini memerlukan sarana penunjang perikanan tangkap berupa PPI dan TPI yang memadai guna memacu roda perekonomian masyarakat nelayan di Kabupaten Bengkulu Utara.

Tabel 2.8 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Bengkulu Utara, 2020 dan 2021

Table 2.8 Number of Fish Capture Households by Subdistrict and Subsector in Bengkulu Utara Regency, 2020 and 2021

	Kecamatan Subdistrict (1)	Perikanan Laut Marine Fisheries	
		2020 (2)	2021 (3)
1	Enggano	466	466
2	Kerkap	-	-
3	Air Napal	461	461
4	Air Besi	35	35
5	Hulu Palik	-	-
6	Tanjung Agung Palik	-	-
7	Arga Makmur	-	-
8	Arma Jaya	-	-
9	Lais	47	47
10	Batik Nau	160	160
11	GiriMulya	-	-
12	Air Padang	-	-
13	Padang Jaya	-	-
14	Ketahun	129	129
15	Napal Putih	-	-
16	Ulok Kupai	-	-
17	Pinang Raya	-	-
18	Putri Hijau	240	240
19	Marga Sakti Sebelat	-	-
<b>Bengkulu Utara</b>		<b>1538</b>	<b>1548</b>

Sumber / Source: Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara / Regional Office of Fisheries of Bengkulu Utara Regency

Tabel 2.9  
Table

Produksi PerikananTangkap Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara (ton), 2020 dan 2021  
Production of Fish Capture by Subdistrict and Subsector in Bengkulu Utara Regency (ton), 2020 and 2021

	Kecamatan Subdistrict (1)	Perikanan Laut Marine Fisheries	
		2020 (2)	2021 (3)
1	Enggano	1.778.25	1.789.25
2	Kerkap		
3	Air Napal	2565.25	2565.25
4	Air Besi	31.89	31.90
5	Hulu Palik		
6	Tanjung Agung Palik		
7	Arga Makmur		
8	Arma Jaya		
9	Lais	32.79	33.75
10	Batik Nau	843.05	860.05
11	GiriMulya		
12	Air Padang		
13	Padang Jaya		
14	Ketahun	140.25	143.25
15	NapalPutih		
16	UlokKupai		
17	Pinang Raya		
18	Putri Hijau	693.75	695.75
19	Marga Sakti Sebelat		
<b>Bengkulu Utara</b>		<b>6085.23</b>	<b>6.129.21</b>

Sumber/ Source: Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara/ Regional Office of Fisheries of Bengkulu Utara Regency

Tabel 2.10 Jumlah Kapal Motor menurut kecamatan Tahun 2020 dan Tahun 2021  
 Table

Kecamatan Subdistrict		Kapal Motor 2020	Kapal Motor 2021
1	Enggano	147	147
2	Kerkap		
3	Air Napal	77	79
4	Air Besi	3	3
5	Hulu Palik		
6	Tanjung Agung Palik		
7	Arga Makmur		
8	Arma Jaya		
9	Lais	5	5
10	Batik Nau	92	92
11	GiriMulya		
12	Air Padang		
13	Padang Jaya		
14	Ketahun	45	45
15	NapalPutih		
16	UlokKupai		
17	Pinang Raya		
18	Putri Hijau	102	102
19	Marga Sakti Sebelat		
<b>Bengkulu Utara</b>		<b>471</b>	<b>473</b>

Sumber/ Source: Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara/ Regional Office of Fisheries of Bengkulu Utara Regency

## **2. Profil Perikanan Budidaya**

Kegiatan budidaya ikan telah lama dijadikan sebagai salah satu sumber mata pencaharian bagi masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara. Jenis usaha budidaya ikan air tawar yang berkembang di Kabupaten Bengkulu Utara adalah jenis usaha budidaya ikan kolam air deras, kolam air tenang, kolam terpal/Bioflog serta budidaya pada perairan umum. Kegiatan budidaya saat ini menjadi salah satu pilihan mata pencaharian penduduk terutama di kawasan Minapolitan sehingga kegiatan budidaya semakin berkembang dari tahun ke tahun. Data jumlah dan luas potensi rumah tangga perikanan budidaya serta produksi perikanan pertahun dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11  
Table

Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Bengkulu Utara, 2020 dan 2021

Number of Aquaculture Households by Subdistrict and Type of Aquaculture in Bengkulu Utara Regency, 2020 and 2021

Kecamatan Subdistrict	Tambak 2020	Tambak 2021	Kolam Fresh Water Pond 2020	Kolam Fresh Water Pond 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Enggano				
2 Kerkap			210	108
3 Air Napal	3	4	35	36
4 Air Besi	1	1	87	36
5 Hulu Palik			75	108
6 Tanjung Agung Palik			58	36
7 Arga Makmur			168	342
8 Arma Jaya			63	108
9 Lais			66	36
10 Batik Nau		1	38	36
11 GiriMulya			185	72
12 Air Padang			23	72
13 Padang Jaya			779	1620
14 Ketahun			300	72
15 NapalPutih			15	18
16 Ulok Kupai			21	21
17 Pinang Raya			279	54
18 Putri Hijau			150	18
19 Marga Sakti Sebelat			18	-
<b>Bengkulu Utara</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2570</b>	<b>2793</b>

Sumber/ Source: Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara/  
Regional Office of Fisheries of Bengkulu Utara Regency

Tabel  
Table 2.12

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Bengkulu Utara (Ton), 2021  
Number of Production of Aquaculture Households by Subdistrict and Type of Aquaculture in Bengkulu Utara Regency (ton), 2021

	Kecamatan Subdistrict	Mas Carp	Nila Nile Tilapia	Gurame Gourami	Patin Irisde cent Shark	Lele Catfish	Lainnya Others
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Enggano						
2	Kerkap	411.14	1.728.39	69.32	81.61	334.75	
3	Air Napal	4.43	18.63	0.74	0.88	3.61	
4	Air Besi	21.36	116.73	4.68	5.51	9.00	
5	Hulu Palik	45.32	190.55	7.64	-	-	
6	Tanjung Agung Palik	-	26.38	-	186.52	510	
7	Arga Makmur	939.63	3.950.04	186.52	6.01	24.65	
8	Arma Jaya	30.28	127.27	5.11	0.36	75.24	
9	Lais	-	7.74	0.36	1.38	564	
10	Batik Nau	520	29.17	1.17	0.38	1.56	
11	Giri Mulya	-	4.04	0.17	-	-	
12	Air Padang	-	-	-	486.49	1.223.00	
13	Padang Jaya	1.470.44	6.181.53	247.92	1.44	5.92	
14	Ketahun	7.25	30.51	1.22	0.14	0.14	
15	Napal Putih	0.74	2.76	1.22	-	-	
16	Ulok Kupai	-	-	-	0.52	0.61	
17	Pinang Raya	2.86	13.08	0.52	0.12	0.47	
18	Putri Hijau	0.59	3.17	0.09	-	-	
19	Marga Sakti Sebelat	-	-	-	-	-	
<b>Jumlah :</b>		<b>2.939.24</b>	<b>12.429.98</b>	<b>498.55</b>	<b>780.36</b>	<b>1.690.05</b>	

Sumber/ Source: Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara/  
Regional Office of Fisheries of Bengkulu Utara Regency

Tabel  
Table 2.13

Luas Wilayah Potensi Rumah Tangga Perikanan  
Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya  
di Kabupaten Bengkulu Utara (Ha), 2021  
*Total Area of Aquaculture Households by Subdistrict  
and Type of Aquaculture in Bengkulu Utara Regency  
(hectar), 2021*

	<b>Kecamatan Subdistrict</b>	<b>Kolam Fresh Water Pond 2019</b>	<b>Kolam Fresh Water Pond 2020</b>	<b>Kolam Fresh Water Pond 2021</b>
1	Enggano			
2	Kerkap	3150	256.84	21.78
3	Air Napal	185	65.83	22.36
4	Air Besi	350	112.37	20.30
5	Hulu Palik	1942	742.42	16.13
6	Tanjung Agung Palik	698	268.34	3.74
7	Arga Makmur	3460	116.4	82.00
8	Arma Jaya	2945	255.34	24.88
9	Lais	150	94.88	7.01
10	Batik Nau	230	202.33	5.06
11	Giri Mulya	2532	495.67	13.99
12	Air Padang	213	86,86	-
13	Padang Jaya	5200	954.21	672.51
14	Ketahun	687	691.54	23.44
15	Napal Putih	976	956.71	5.22
16	Ulok Kupai	708	408.64	-
17	Pinang Raya	1112	395,27	29.57
18	Putri Hijau	1131	1221.24	10.16
19	Marga Sakti Sebelat	170	956.71	-
<b>Bengkulu Utara</b>		<b>28.960</b>	<b>8.281.6</b>	<b>855.85</b>

Sumber/ Source: Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara/  
Regional Office of Fisheries of Bengkulu Utara Regency

Dilihat dari data luas wilayah potensi rumah tangga yang tersedia di Kabupaten Bengkulu Utara, masih tersedia peluang untuk memanfaatkan lahan yang belum digarap untuk dijadikan kolam. Belum optimalnya pemanfaatan lahan yang tersedia menjadi peluang bagi pembudidaya ikan terutama di kawasan minapolitan untuk memanfaatkan lahan tersebut.

Ditinjau dari produksi perikanan budidaya, pertumbuhan jumlah produksinya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa usaha budidaya ikan air tawar adalah salah satu mata pencaharian.

### **3. Profil Perizinan dan Pembinaan Pelaku Usaha**

Hasil perikanan di Kabupaten Bengkulu Utara terutama yang berasal dari hasil tangkapan di laut sebagian besar masih diolah secara tradisional (skala rumah tangga) yaitu dengan cara diasinkan dan diasap. Sedangkan pemasaran ikan masih berkisar di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu dan propinsi tetangga.

Untuk pemanfaatan potensi sumber daya ikan tidak saja berorientasi pada peningkatan produksi, akan tetapi harus dilakukan juga pembinaan dan partisipasi dari masyarakat dalam hal perizinan, mengakomodasi teknologi yang sesuai serta peningkatan ilmu dan teknologi yang tepat guna di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Hasil perikanan di Kabupaten Bengkulu Utara terutama yang berasal dari hasil tangkapan di laut sebagian besar diolah

dengan cara diasinkan atau diasap. Nelayan yang bergerak di bidang pengolahan dari 7 kecamatan pesisir hanya 4 kecamatan yang mengolah hasil tangkapan. Sebagian hasil tangkapan di jual atau dipasarkan dalam bentuk segar. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14. Data Kecamatan, Kelurahan, Desa Wilayah Pesisir, Kabupaten Bengkulu Utara

No	Lokasi		Nama Kelompok	Ketua Kelompok	Jumlah RTP Pengolahan		Tahun berdiri	Produksi (kg)	Ket.
	Kecamatan	Desa							
1.	Kecamatan Arga Makmur	Kelurahan Purwodadi	Setia Kawan	Mat Salim	10	Orang	1 Juni 2011	1.305	
		Karang Suci	Mutiara Laut	Ramyulen	10	Orang	11 Desember 2013	685	
2.	Kecamatan Padang Jaya	Padang Jaya	Melati I	Umi Partini	10	Orang	22 Januari 2012	3.250	
		Tambak Rejo	Riung Bunda	Nurhayati	10	Orang	15 Desember 2015	-	
3.	Kecamatan Arma Jaya	Sumber Agung	Rafflesia	Sri Mulyani	10	Orang	22 Januari 2013	1.689	
4.	Kecamatan Ketahun	Pasar Ketahun	Berkah Salai	Asnaini	8	Orang	2 September 2012	1.095	
5.	Kecamatan Putri Hijau	Pasar Seblat	Salai Makmur	Rahmad	10	Orang	12 November 2013	4.060	
6.	Kecamatan Enggano	Banjar Sari	Melati Putih	Herdianti	10	Orang	13 Desember 2013	523	
		Banjar Sari	Gurih Asin	Saodah	10	Orang	13 Desember 2013	341	
		Banjar Sari	Mutiara Laut	Murni	10	Orang	10 Desember 2013	540	
		Kaana	Sinar Harapan	Tarikas	10	Orang	13 Desember 2013	361	
		Kaana	Sinar Laut	Jailani	10	Orang	11 Desember 2013	491	
		Kaana	Arau	Buaseiri	10	Orang	11 Desember 2013	447	

		Kaana	Mega Dialek	Iwan Usmawanto	10	Orang	14 Desember 2013	254	
7.	Kecamatan Air Napal	Pasar Tebat	Sungai Merah	Zamratul Fauziah	10	Orang	10 Agustus 2013	-	
		Pasar Tebat	Air merah	Y u r n i	11	Orang	8 September 2013	-	
		Tebing kandang	Bunga Harapan	Siti Khadija	10	Orang	5 Mei 2014	-	
8.	Kecamatan Kerkap	Magelang	Usaha Mekar Sari	Asni Yunidar	10	Orang	-	-	
9.	Kecamatan Batik Nau	Serangai	Usaha Mandiri	Rida Yusni	10	Orang	-	-	
		Serangai	Serangai Jaya	Sahara Wati	14	orang	20 Februari 2015	-	
Jumlah Kelompok Pengolahan dan Jumlah Anggota Kelompok			20 Kelompok		203	Orang	15.041	15.041	

Sumber/ Source: Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara/ Regional Office of Fisheries of Bengkulu Utara Regency

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Tahun 2021 adalah tahun terakhir dari Renstra 2016-2021, sesuai dengan fungsinya Dinas Perikanan melaksanakan urusan bidang perikanan. Pembangunan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara yang sejahtera melalui pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang aman, lestari dan berdaya saing.

Evaluasi kinerja program prioritas Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara, diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap  
Produksi perikanan tangkap tahun 2020 sebesar 6.085,23 ton dan tahun 2021 sebesar 6.129,21 ton. Persentase kenaikan produksi perikanan tangkap sebesar 0,72%. Bila dibandingkan target tahun 2021 sebesar 6.128,65 ton maka capaiannya adalah 100,01%.
2. Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya  
Produksi perikanan budidaya tahun 2020 sebesar 14.726 ton dan tahun 2021 sebesar 14.868,10 ton. Persentase kenaikan produksi perikanan budidaya sebesar 0,96%. Bila dibandingkan target tahun 2021 sebesar 14.873,26 ton, maka capaiannya adalah 99,96%.
3. Persentase peningkatan atau penurunan tingkat konsumsi ikan per- kapita/tahun

Tingkat konsumsi ikan per-kapita tahun 2020 sebesar 33,25 perkapita/tahun dan tahun 2021 sebesar 40,66 perkapita/tahun. Mengalami kenaikan dikarenakan mulai stabilnya perekonomian masyarakat dari wabah covid-19 sehingga berdampak juga terhadap konsumsi ikan perkapita. Persentase kenaikan konsumsi ikan per-kapita sebesar 0,2%. Bila dibandingkan target tahun 2021 sebesar 33,45 perkapita/tahun, maka capaiannya adalah 1,2%.

Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan Tahun 2016 hingga Tahun 2021 dapat di lihat pada Tabel 2.15 dan Tabel 2.16 sebagai berikut :

**Tabel 2.18**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan**  
**Kabupaten Bengkulu Utara**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SP4	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.2.5	Kebutuhan dan Perikanan																		
2.2.5.1	Produksi perikanan																		
	Tangkap (ton)				5.300	5.500	5.700	5.900	6.050	5.322.20	5.510.00	5.700.06	5.901.89	6.085.23	100.42	100.18	100.00	100.03	100.58
	Budidaya (ton)				13.000	12.000	13.200	14.000	14.500	11.350.41	12.400.32	13.234.00	14.374.63	14.726.00	103.19	103.34	100.26	102.68	101.56
2.2.5.4	Konsumsi Ikan (Kg orang Per Tahun)				33.10	33.22	33.25	33.30	33.45	33.15	33.24	33.36	33.36	33.25	100.15	100.06	100.33	100.18	99.40
2.2.5.4	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)				27.50	32.50	34.50	35.00	35.00	27.58	32.44	34.22	34.22	34.22	100.22	99.82	98.19	97.77	97.77

Arga Makmur, 2021

Kepala Dinas,

**SUGIMIN, S.Pd, M.Pd**  
 NIP. 19661103 1986121 001

Tabel 2.16  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan  
 Kabupaten Bengkulu Utara

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran Pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	16	17	18
<b>PAD</b>																				
Retribusi (Jin Utaka Substansi Perikanan)	48.000,000	4.300,000	15.000,000	37.368,000	29.000,000	49.000,000	26.736,000	19.731,500	21.478,000	28.000,000	35.100,710	80.168,000	65,70	458,82	141,85	48,17	121,04	61,57	1.000,000	1.432,500
Pendapatan Lain-lain	65.000,000	8.000,000	78.000,000	40.000,000	40.000,000	5.062.938,808	26.500,000	6.811,000	21.800,000	28.300,000	10.600,000	-	40,46	85,15	21,44	45,75	49,80	0	4.997,000,000	(18.800,000)
Belanja Langsung	4.583.051,000	5.127.868,000	3.981.600,000,00	2.217.868,000	3.707.997,200	2.060.575,835	4.457.312,546	4.841.069,878	3.037.412,497	1.303.838,447	3.704.710,283	2.035.007,581	28,98	56,17	58,18	55,42	50,50	58,70	(2.441.481,167)	12.412.304,960
Belanja Tidak Langsung	1.710.803,073	3.446.067,694	2.713.328,836,00	2.692.441,860	2.492.213,389	3.002.351,472	3.339.680,060	2.978.251,254	2.208.411,860	1.991.951,590	2.938.851,626	2.524.612,911	40,00	80,42	90,78	88,62	93,75	84,39	(908.450,600)	1015.028,331

Arqa Makmur,  
 Kepala Dinas, 2021

SUGIMIN, S.Pd, M.Pd  
 NIP. 19661103 198612 1 001

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat**

### **Daerah**

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat dilakukan identifikasi terhadap potensi tantangan dan peluang dalam pembangunan perikanan di Kabupaten Bengkulu Utara guna menghasilkan strategi. Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pada Dinas Perikanan sebagai berikut :

#### **a. Peluang**

1. Dukungan Pemerintah pada sub sektor perikanan dan kelautan semakin besar;
2. Teknologi dan inovasi perikanan dan kelautan yang semakin berkembang;
3. Tingkat kebutuhan masyarakat akan konsumsi produk hasil perikanan dan kelautan semakin meningkat;
4. Makin bertambahnya pelaku usaha di bidang perikanan dan kelautan;
5. Adanya program nasional di bidang perikanan dan kelautan;

#### **b. Tantangan**

1. Biaya operasional yang tinggi pada usaha budidaya ikan yang mengakibatkan penurunan keuntungan;
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia perikanan dan kelautan yang belum merata;
3. Keterbatasan pelaku usaha perikanan untuk mengakses layanan permodalan;

4. Tuntutan penyediaan produk berdaya saing dan berkelanjutan;
5. Terbatasnya lahan pengembangan sentra perikanan di wilayah pesisir;
6. Sarana prasarana transportasi dan infrastruktur di wilayah pesisir belum memadai;
7. Perubahan cuaca yang mempengaruhi musim penangkapan ikan;

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya pengembangan dan pengelolaan potensi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya mengalami beberapa kendala yaitu :

1. Pada bidang pemberdayaan nelayan kecil mengalami kesulitan dalam meningkatkan produksi / hasil tangkapan ikan disebabkan oleh :
  - a. Penurunan sumber daya ikan yang disebabkan degradasi lingkungan pesisir, penangkapan ikan yang merusak lingkungan dan *illegal fishing*.
  - b. Kondisi cuaca yang tidak menentu menyebabkan jumlah trip melaut berkurang atau lebih sedikit.
  - c. Sebagian besar armada penangkapan yang dipakai berukuran kecil yang beroperasi *one day fishing* dengan jangkauan *fishing ground* lebih dekat dan jumlah alat tangkap yang terbatas serta kurang bervariasi.
  - d. Belum beroperasinya TPI yang ada secara optimal serta keterbatasan permodalan yang kurang mendorong kemajuan usaha penangkapan ikan.
  - e. Kurangnya investor dibidang usaha penangkapan ikan yang menanamkan modal.

- f. Kualitas SDM masih rendah
2. Pada bidang pemberdayaan pembudidaya ikan mengalami kesulitan dalam meningkatkan produksi ikan air tawar disebabkan oleh :
- a. Kenaikan harga pakan ikan mengakibatkan biaya operasional usaha budidaya ikan semakin tinggi dan mengurangi keuntungan usaha karena ketergantungan terhadap pakan jadi masih cukup tinggi;
  - b. Masih terbatasnya ketersediaan benih dan induk ikan unggul yang menjadi faktor kunci keberhasilan usaha budidaya ikan;
  - c. Belum optimalnya sarana pembenihan, baik BBI maupun UPR sehingga belum didapatkannya benih yang bermutu dengan jumlah yang cukup dan berkelanjutan;
  - d. Lemahnya Sistem Pemasaran Ikan Budidaya.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

#### **a. Visi Kabupaten Bengkulu Utara**

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka

menengah daerah maka Visi kabupaten Bengkulu utara Tahun 2021-2026.

**“Terwujudnya Masyarakat Adil dan Sejahtera Didukung  
Sumberdaya Manusia Berkualitas”**

b. Misi Kabupaten Bengkulu Utara

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

## Visi dan Misi Kepala Daerah

### VISI

**Terwujudnya Masyarakat Adil dan Sejahtera Didukung Sumberdaya Manusia Berkualitas**

### MISI

**Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing**  
**Memperkuat infrastruktur untuk mendukung ekonomi dan pelayanan**  
**Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui ekonomi kerakyatan**  
**Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan**

**Strategi pembangunan misi ke satu.** Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul di Kabupaten Bengkulu Utara, termasuk di peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat; peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; dan peningkatan kuantitas/kualitas guru (kualitas pendidikan); peningkatan kualitas pembelajaran (daya saing di pasar kerja); pemerataan kualifikasi dan penempatan guru; dan pemantapan kesejahteraan guru. Penanganan pandemi Covid-19, peningkatan kapasitas dan kualitas fasilitas layanan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah baik dari sisi SDM maupun sarana prasarana, terutama dalam kemampuan penanganan pandemi Covid-19; peningkatan akses pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil; peningkatan kuantitas dan kualitas dokter dan paramedis; kepastian layanan jaminan kesehatan; dan pemantapan kesejahteraan dokter dan paramedis; meningkatkan kesetaraan

gender dan pemberdayaan perempuan; dan peningkatan peran pemuda untuk tumbuh kembang prestasi.

**Strategi pembangunan misi ke dua.** Kualitas dan kuantitas infrastruktur strategis dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan pembangunan sarana dan prasarana irigasi perdesaan; jalan dan jembatan; peningkatan jangkauan listrik perdesaan; pembangunan dan/atau perbaikan jalan desa ke sentra-sentra produksi; dan peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih dan revitalisasi pasar desa. Sementara kualitas dan kuantitas infrastuktur pelayanan dasar berupa sanitasi, air minum, perumahan, persampahan, infrastuktur pendidikan dan kesehatan. Misi ini terutama ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan dan ketertinggalan desa-desa terpencil dan terisolir. Selain itu pembangunan infrastuktur diharapkan dapat membuka keterisolasian dan/atau kelancaran arus barang dan orang agar memiliki keunggulan kompetitif dan berdaya saing untuk menarik minat investasi.

**Strategi pembangunan misi ke tiga.** Peningkatan pembangunan sektor unggulan pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, pariwisata, peningkatan akses permodalan bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi dalam bentuk kemitraan yang saling menguntungkan, peningkatan daya saing produk UMKM melalui pelatihan dan pendampingan; pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal; revitalisasi

koperasi dan kelompok usaha baru (KUB); peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES); menggalakkan ekspose produk UMKM di tingkat nasional dan regional, dan peningkatan daya saing daerah dan investasi.

**Strategi pembangunan misi ke empat.** Perbaikan tata kelola pemerintahan; pengelolaan APBD yang efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konsisten dengan perencanaan daerah; mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa; peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan melalui model *e- government*

Misi dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 tersebut mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006-2026, dan oleh karenanya terdapat hubungan yang kuat antara Misi dalam RPJPD dengan Misi dalam RPJMD. Apabila dalam RPJPD 2006-2026 sebagaimana dikemukakan diatas terdiri atas 4 (empat) misi, maka pada RPJMD 2021-2026 juga terdiri dari 4 (empat) misi yang saling mendukung kinerja pencapaian misi jangka panjang.

#### c. Telaah Visi dan Misi Kabupaten Bengkulu Utara

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Organisasi Perangkat Daerah mengemban tugas memajukan perekonomian di bidang kelautan dan perikanan dapat dijadikan andalan. Dalam kaitannya dengan Visi Kabupaten Bengkulu Utara

yaitu Terwujudnya Masyarakat Adil dan Sejahtera Didukung Sumberdaya Manusia Berkualitas, Dinas Perikanan memiliki andil dalam pembangunan perekonomian melalui bidang kelautan dan perikanan.

Dalam upaya pembangunan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya ikan secara bijaksana dan berkelanjutan, peningkatan produksi serta pemasaran hasil perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara memiliki beberapa program kerja antara lain : Pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya yang meliputi, pemberdayaan ekonomi nelayan dan pembudidaya baik melalui program pengembangan perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, penyuluhan kepada masyarakat pesisir/nelayan serta pembudidaya ikan air tawar, kerjasama dengan pihak perbankan dalam rangka memperoleh modal pinjaman lunak, mengoptimalkan kinerja BBI dan TPI, pembangunan/pengembangan sarana prasarana baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, peningkatan kualitas SDM masyarakat perikanan. Selain itu Dinas Perikanan juga akan melaksanakan program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan guna memperluas jaringan pemasaran hasil perikanan. Dengan beberapa program kerja ini diharapkan mampu mendorong peningkatan produksi sebesar  $\pm 1,8\%$  pertahun sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan dan pembudidaya ikan.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia**

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Renstra KKP Tahun 2020-2024), Visi KKP Tahun 2020-2024 adalah menjabarkan arahan Presiden bahwa **"Laut adalah Masa Depan Bangsa"** yaitu mewujudkan sumber daya kelautan dan perikanan yang berdaulat dan berkelanjutan serta masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 (tiga) pilar yang menjadi misi KKP yaitu:

1. Kedaulatan (*Sovereignty*), yaitu mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (*Sustainability*), yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan (*Prosperity*), yaitu mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Ketiga misi tersebut dilakukan secara bertanggung jawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat, dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial, dan budaya bagi kepentingan bersama.

Pembangunan kelautan dan perikanan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang terjaga. Pencapaian peran tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan yang terkait dengan prioritas pembangunan ke depan, diantaranya adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, memperkuat pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, membangun kebudayaan dan karakter bangsa, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dan transformasi pelayanan publik. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan kelautan dan perikanan yang disusun menjabarkan 3 (tiga) pilar dalam misi pembangunan kelautan dan perikanan termasuk strategi dan langkah operasional yang dijabarkan sebagai berikut

## 1. Kebijakan Pokok

- a. membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- b. menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan.
- c. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan usaha kelautan dan perikanan.

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, strategi dan langkah operasional yang akan ditempuh adalah :

- a. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilakukan dalam rangka membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilaksanakan dengan strategi :
  - 1) Pemberantasan IUU *Fishing* dan *Destructive Fishing*  
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah:
    - a) pencegahan terjadinya pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan;
    - b) pemantauan terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
    - c) operasional pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP);

- d) operasi armada pengawasan SDKP; dan
- e) penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.

2) Penguatan Sistem Karantina Ikan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah :

- a) penguatan sistem karantina ikan;
  - b) sinergi pengawasan lalu lintas ikan;
  - c) pelayanan tindak karantina ikan di *entry* dan *exit point* serta pos lintas batas (*gateway*) wilayah perbatasan;
  - d) pengendalian agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan bersifat invasif.
- b. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan dengan strategi :
- 1) pengelolaan sumber daya perikanan budidaya yang berkelanjutan dilakukan dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya perikanan budidaya bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan. Selanjutnya arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan strategi optimalisasi produksi, dan produktivitas perikanan tangkap, penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap, pengelolaan sumber

daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap, peningkatan keberdayaan nelayan untuk mewujudkan usaha perikanan tangkap yang berdaya saing dan berkelanjutan.

- 2) pengelolaan sumber daya perikanan tangkap yang berkelanjutan dilakukan melalui peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
- 3) pengelolaan sumber daya kelautan yang berdaya saing dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a) zonasi dan tata ruang laut;
  - b) pengembangan produk dan jasa kelautan;
  - c) konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati perairan;
  - d) mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
  - e) penanganan pencemaran laut dan sampah plastik; dan
  - f) penumbuhan budaya bahari, riset, dan data kelautan.
- 4) Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang sensitif terhadap kerentanan bencana dan perubahan iklim. Dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a) peningkatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;

- b) pengarusutamaan pembangunan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan yang adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim; dan
  - c) penyiapan program khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di pesisir dan pulau-pulau kecil.
- c. Peningkatan mutu, nilai tambah, dan daya saing dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi bidang kelautan dan perikanan dengan strategi
- 1) peningkatan mutu, nilai tambah, dan daya saing; dan
  - 2) peningkatan usaha dan investasi kelautan dan perikanan.
- d. Mewujudkan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilakukan dengan strategi :
- 1) peningkatan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
  - 2) peningkatan inovasi teknologi dan riset bidang kelautan dan perikanan.
- e. kebijakan berbasis data, informasi, dan pengetahuan yang faktual dilakukan melalui pendekatan transformasi digital dengan strategi *one data* KKP, keterbukaan informasi secara bertanggung jawab berbasis *website* dan transparansi perizinan berbasis *online system* dan penetapan kebijakan berbasis riset dan pengetahuan faktual.

f. optimasi reformasi birokrasi menuju birokrasi KKP berkelas dunia dilakukan dalam rangka implementasi reformasi birokrasi KKP berdasarkan prioritas dan kepentingan nasional yang dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan, yaitu :

- 1) *human capital*;
- 2) *organization capital*;
- 3) *financial & planning capital*;
- 4) *information capital*;
- 5) *control capital*.

## 2. Kebijakan Pengarusutamaan

### a. Gender

Untuk melaksanakan arah kebijakan terkait gender, strategi dan langkah operasional yang akan ditempuh adalah meningkatkan peran, akses, kontrol, dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Langkah operasional yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat dan daerah yang mencakup :

- 1) penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- 2) penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di KKP;
- 3) penyiapan *roadmap* PUG;

- 4) penyusunan data terpilah;
  - 5) pengembangan statistik gender;
  - 6) pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit kerja eselon I di KKP dan antar pusat daerah;
  - 7) pembuatan profil gender;
  - 8) monitoring dan evaluasi PUG KKP.
- b. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan KKP dilakukan dengan strategi peningkatan kualitas manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), *talent management* untuk pengembangan pola rekrutmen dan suksesi pimpinan, *assessment center* untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai secara rutin, dan *carrier plan* untuk penyiapan pola karir pegawai sesuai kompetensi dan bakat, *reward and punishment*, mengelola, mengembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan menjadikan SDM ASN sebagai modal, *information capital* (e-KKP dalam rangka mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan *one data* serta *corporate university*, *organization capital* (*right sizing*/penataan organisasi sesuai perkembangan dan kebutuhan, penataan birokrasi menuju *world class government*, *smart office and green building*, dan kerja sama yang memberikan *mutual benefit* pusat-daerah, antardaerah, dan internasional), *finansial capital* (*e-planning*, dan *e-budgeting*), dan

*control capital* (penguatan sistem pengendalian *intern* dan pengawasan *intern*).

c. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan masa depan yang diharapkan oleh bangsa-bangsa di dunia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan memuat 3 (tiga) isu utama, yaitu :

- 1) ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan;
- 2) pengembangan kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan; dan
- 3) kerangka aksi dan instrumen pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Kerangka aksi tersebut memuat penyusunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs).

d. Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim

Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah :

- 1) rehabilitasi wilayah pesisir (termasuk pembangunan *green belt*) dan lingkungan laut;
- 2) pengembangan kawasan pesisir tangguh;
- 3) sistem peringatan dini kebencanaan wilayah pesisir laut;
- 4) pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- 5) modal.

#### e. Modal Sosial Budaya

Modal sosial budaya merupakan seperangkat nilai, norma, institusi, dan jejaring sosial, dan sumber daya kebudayaan lainnya yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Modal sosial budaya tersebut jika dikelola dan dikembangkan dengan baik dapat memperkuat kohesi sosial, kerukunan, toleransi, gotong-royong, dan kerja sama antarwarga. Pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan sebagai strategi untuk meningkatkan peran nilai dan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan. Strategi ini menempatkan kebudayaan sebagai ruh dalam pembangunan dan nafas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengarusutamaan modal sosial budaya dilakukan dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan mendayagunakan kekayaan budaya untuk mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil.

#### f. Transformasi Digital

Penerapan transformasi digital di lingkungan KKP dilakukan melalui Penerapan SPBE KKP dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*. Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan *one data* serta penataan sistem perizinan berbasis web (*online*).

### 3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan memiliki;

#### **VISI:**

"Mewujudkan Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan, Maju, dan Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat".

#### **MISI:**

1. Meningkatkan produk hasil kelautan dan perikanan yang aman, bernilai tambah dan berdaya saing.
2. Mengoptimalkan pengelolaan, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan.
4. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sumberdaya manusia kelautan dan perikanan.

Implementasi dari pernyataan misi Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1 sampai dengan 5 tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatkan pengelolaan, pengawasan sumberdaya kelautan

dan perikanan yang berkelanjutan.

2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan daya saing serta sistem logistik ikan menuju keamanan pangan.
3. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut.
4. Meningkatkan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang taat aturan.

Sasaran dalam pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan tersebut adalah:

1. Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap serta pengembangan kemaritiman.
2. Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan pengelolaan hasil perikanan.
3. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut serta pemberdayaan masyarakat pesisir.
4. Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang taat aturan.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut maka strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang ditempuh adalah:

1. Operasional pemanfaatan, potensi dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Optimalisasi pendayagunaan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya kemaritiman.

Dalam mencapai kegiatan pembangunan yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan tersebut, maka kebijakan umum pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Bengkulu adalah “Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya dan tangkap yang berkelanjutan serta pengelolaan dan pengawasan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan”.

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara sebagai unsur pelaksana kebijakan bidang kelautan dan perikanan di daerah mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya pada misi ke-3 yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui ekonomi kerakyatan. Sejalan dengan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Bengkulu Utara juga berupaya untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya demi kesejahteraan pembudidaya dan nelayan skala kecil.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2035, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat dari

wilayah kabupaten, yang berupa rencana operasional pembangunan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan peran dan fungsi wilayah yang telah ditetapkan dalam RTRW yang akan menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kabupaten.

Salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan potensi daerah sesuai dengan sumberdaya alam yang dimiliki adalah dengan menetapkan kawasan pengembangan Minapolitan. Kebijakan pemerintah daerah tersebut dituangkan melalui Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara mengenai Penetapan lokasi pengembangan kawasan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 253 tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Minapolitan Kabupaten Bengkulu Utara.

Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran, komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/ atau kegiatan pendukung lainnya. Kawasan minapolitan budidaya di Kabupaten Bengkulu Utara berada di Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Arga Makmur dan Kecamatan Kerkap.

Berdasarkan RTRW kabupaten, pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan harus didasarkan pada azas:

1. manfaat yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam pelayanan kegiatan pemerintahan, pendidikan dan kebudayaan, perdagangan dan jasa, serta transportasi.

2. keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang;
3. kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang; dan
4. keterbukaan yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam proses penataan ruang.

Dalam upaya peningkatan produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya mengalami beberapa kendala terkait rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis. Terkait Rencana Tata Ruang Wilayah, pengembangan sektor perkebunan dan pertanian mempengaruhi kegiatan pengembangan budidaya ikan air tawar. Hal ini disebabkan ketersediaan air untuk memenuhi aktivitas perkebunan, pertanian dan perikanan tidak mencukupi. Guna mengatasi masalah ini perlu pengaturan dalam pemanfaatan air dengan beberapa cara antara lain pelarangan pembendungan saluran primer, dalam pembuatan pintu masuk saluran sekunder diupayakan ukurannya tidak melebihi 30% dari ukuran saluran primer dan air yang telah dipakai untuk segala aktivitas diupayakan kembali ke saluran primer.

#### **3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek

negatif dari suatu kegiatan pembangunan terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program

Penerapan KLHS dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah.

Pengembangan dan pengelolaan potensi perikanan khususnya di bidang perikanan budidaya harus memperhatikan fungsi lahan tersebut, agar aktivitas perikanan tidak mengurangi daya dukung lingkungannya.

Ditinjau dari implikasi KLHS, program dan kegiatan yang ada pada Dinas Perikanan tidak bertentangan dengan rekomendasi KLHS atau tidak berdampak negatif bagi lingkungan hidup.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Dalam penentuan isu-isu strategis, Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara merumuskan kendala-kendala yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi perikanan selanjutnya

merumuskan program kerja yang akan dilakukan guna menghadapi tantangan di atas. Adapun isu-isu strategis tersebut antara lain :

1. Kenaikan harga pakan ikan mengakibatkan biaya operasional usaha budidaya ikan semakin tinggi dan mengurangi keuntungan usaha karena ketergantungan terhadap pakan jadi masih cukup tinggi;
2. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, dimana masih banyak ditemukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan bahan yang dilarang;
3. Masih terbatasnya ketersediaan benih dan induk ikan unggul yang bersertifikat CBIB (cara budidaya ikan yang baik) dan CPIB (cara pembenihan ikan yang baik) yang menjadi faktor kunci keberhasilan usaha budidaya ikan;
4. Tingkat konsumsi ikan di masyarakat masih di bawah target nasional;
5. Terbatasnya sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang sesuai standar kompetensi kelautan dan perikanan;
6. Belum terlaksananya standar kelayakan mutu UMKM olahan perikanan;
7. Masih rendahnya UMKM perikanan dalam mengakses permodalan;
8. Masih rendahnya fasilitasi pemasaran ikan yang mendukung stabilitas harga ikan.

**BAB. IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara didukung oleh beberapa bidang teknis dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang jelas dan terukur.

**1. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
- Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

**2. Sasaran**

Adapun Sasaran pembangunan bidang kelautan dan Perikanan yaitu :

- Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja birokrasi

- Meningkatnya pertumbuhan Produksi perikanan pada sektor perikanan (tangkap, budidaya, olahan dan pemasaran hasil perikanan )

Untuk lebih jelasnya mengenai rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	4 Nilai/predikat AKIP SKPD	5 BB	6 A	7 A	8 AA	9 AA
2	Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya pertumbuhan Produksi perikanan pada sektor perikanan (tangkap, budidaya, olahan dan pemasaran hasil perikanan.)	Persentase pertumbuhan produksi perikanan pertahun (%)	1.55	1.84	2.17	2.54	2.89

**BAB. V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**A. Strategi**

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berikut strategi dan kebijakan yang sudah dirumuskan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara, yakni :

Strategi dalam pencapaian sasaran meningkatnya kinerja pembinaan akuntabilitas kinerja yaitu :

- Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran (casecade down), mulai dari level pimpinan eselon dua sampai dengan indikator kinerja di level individu staf/ fungsional umum.
- Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja
- Meningkatkan sarana dan parasarana pendukung kerja aparatur.

Sedangkan Strategi dalam pencapaian sasaran meningkatnya pertumbuhan produksi perikanan pada sektor perikanan (tangkap, budidaya, olahan dan pemasaran hasil perikanan) yaitu:

- Peningkatan armada penangkapan ikan baik ukuran maupun jumlah.
- Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun usaha pengolahan ikan.

- Pengembangan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
- Mengoptimalkan kinerja TPI, BBI, dan Pasar Benih Ikan.
- Pemberdayaan masyarakat pesisir, kelompok nelayan, Koperasi, UPR, Pokdakan dan pelaku usaha perikanan lainnya.
- Perluasan jaringan pemasaran hasil perikanan.
- Peningkatan kualitas SDM pada masyarakat pelaku usaha perikanan melalui Bimtek dan penyuluhan perikanan.
- Mengundang investor guna menanamkan investasi di bidang perikanan tangkap.
- Menjembatani penyediaan permodalan pelaku usaha perikanan dari perbankan.
- Pengembangan kawasan minapolitan termasuk Intensifikasi dan Ekstensifikasi lahan budidaya ikan air tawar.
- Penyediaan benih ikan berkualitas dan berstandar nasional Indonesia.
- Mensinergikan *stake holder* perikanan budidaya melalui segmentasi usaha.
- Pengembangan kawasan konservasi perikanan.
- Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara profesional, efektif, efisien dan berkelanjutan.

## **B. Kebijakan**

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung sasaran meningkatnya kinerja pembinaan akuntabilitas kinerja yaitu :

- Menjadikan dokumen perjanjian kinerja sebagai dasar penilaian kinerja, pemberian *reward* dan *punishment* aparatur .

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung sasaran meningkatnya pertumbuhan produksi perikanan pada sektor perikanan (tangkap, budidaya, olahan dan pemasaran hasil perikanan) antara lain :

- Mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan;
- Meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- Mengembangkan kompetensi SDM dan iptek inovatif;
- Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.

Untuk lebih jelasnya mengenai rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1

## Tujuan , Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Adil dan Sejahtera Didukung Sumberdaya Manusia Berkualitas				
Misi 3 : Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui ekonomi kerakyatan				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran (cascade down), mulai dari level pimpinan eselon dua sampai dengan indikator kinerja di level individu staf/ fungsional umum.</li> <li>2) Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja</li> <li>3) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menjadikan dokumen perjanjian kinerja sebagai dasar penilaian kinerja, pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> aparatur .</li> </ol>
2.	Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya pertumbuhan Produksi perikanan pada sektor perikanan (tangkap, budidaya, olahan dan pemasaran hasil perikanan )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan armada penangkapan ikan baik ukuran maupun jumlah.</li> <li>2) Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun usaha pengolahan ikan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan;</li> <li>2) Meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>3) Pengembangan pelaku usaha kelautan dan perikanan.</li> <li>4) Mengoptimalkan kinerja TPI, BBI, dan Pasar Benih Ikan.</li> <li>5) Pemberdayaan masyarakat pesisir, kelompok nelayan, Koperasi, UPR, Pokdakan dan pelaku usaha perikanan lainnya.</li> <li>6) Perluasan jaringan pemasaran hasil perikanan.</li> <li>7) Peningkatan kualitas SDM pada masyarakat pelaku usaha perikanan melalui Bimtek dan penyuluhan perikanan.</li> <li>8) Mengundang investor guna menanamkan investasi di bidang perikanan tangkap.</li> <li>9) Menjembatani penyediaan permodalan pelaku usaha perikanan dari perbankan.</li> <li>10) Pengembangan kawasan minapolitan termasuk Intensifikasi dan Ekstensifikasi lahan budidaya ikan air tawar.</li> <li>11) Penyediaan benih ikan berkualitas dan berstandar nasional Indonesia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3) Mengembangkan kompetensi SDM dan iptek inovatif;</li> <li>4) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.</li> </ol>
--	--	--	---	--

			12) Mensinergikan <i>stake holder</i> perikanan budidaya melalui segmentasi usaha.	
			13) Pengembangan kawasan konservasi perikanan.	
			14) Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara profesional, efektif, efisien dan berkelanjutan.	

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Arah kebijakan dan strategi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan tahun 2021-2026, sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**

Program ini bertujuan untuk menunjang kelancaran proses administrasi kantor dan mendukung akuntabilitas kinerja. Sasaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah ketersediaan alat tulis kantor dan sarana penunjang administrasi kantor, ketersediaan sarana kebersihan, komunikasi, listrik dan sumber daya air serta ketersediaan biaya operasional kantor selama lima tahun anggaran, selain itu juga dalam upaya meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja SKPD.

Sedangkan untuk indikator kinerjanya adalah persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar berjalan efektif, efisien, lancar dan tepat waktu.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program diatas antara lain :

##### **a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah. Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :
- Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah. Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :
- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :
- Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun indikator kinerjanya adalah persentase peningkatan produksi perikanan tangkap pertahun.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program diatas antara lain :

a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional. Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :

- Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

b. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota. Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :

- a. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
- b. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil

c. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

- Pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

## **3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya melalui peningkatan sarana dan prasarana kelompok pembudidaya ikan serta pembinaan sosialisasi mengenai pengembangan

budidaya ikan yang baik. Adapun indikator kinerjanya adalah persentase peningkatan produksi perikanan budidaya pertahun.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program diatas antara lain :

a. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :

- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
- Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat
- Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat

b. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

- Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil
- Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan , teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

#### **4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pengolahan ikan guna meningkatkan nilai tambah/jual produksi perikanan untuk mendukung perekonomian dan ketahanan pangan masyarakat. Adapun indikator kinerjanya adalah persentase peningkatan produksi pengolahan ikan pertahun.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program diatas antara lain :

a. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil. Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :

- Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

b. Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil.

- Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil

c. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :

- Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1  
 Rencana Program, Kegiatan dan Realisasi Perangkat Daerah Dinas Perikanan  
 Kabupaten Bengkulu Utara

TUJUAN	SABARAN	KODE				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEMUNGKINAN PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
		JILID	BAGIAN/URUSAN	PROGRAM	KELOMPOK			SUB KEGIATAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE REKORD PERANGKAT DAERAH			
									TAHUN 2022	TAHUN 2023	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET			(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
DINAS PERIKANAN :									3,770,811,284													
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	3	25	01		Program Perungjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perungjang Perangkat Daerah (%)	85	100	100	3,677,658,638									Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara	
		3	25	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah (%)	85	100	100	65,748,855										Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara
		3	25	01	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (dokumen)	0	2	3	35,495,175										Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara
		3	25	01	2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA (dokumen)	1	1	1	1,130,719										Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara
		3	25	01	2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA (dokumen)	1	1	1	1,676,291										Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara
		3	25	01	2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan (dokumen)	2	1	1	925,600										Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara
		3	25	01	2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang tersedia (laporan)	2	2	4	24,307,030										Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara
		3	25	01	2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen (dokumen)	2	2	2											Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN										UNTUK KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
		URUTAN	BAGIAN URUTAN	PROGRAM	KEGIATAN			SUB KEGIATAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
									TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET			(Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.		
		3	25	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan efisiensi/efektivitas keuangan Perangkat Daerah (%)	85	100	100	3,144,373,340									Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara	
		3	25	01	2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN (%)	85	100	100	1,083,561,284									Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara	
		3	25	01	2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Persentase pemenuhan administrasi pelaksanaan tugas ASN (%)	80	85	85										Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara	
		3	25	01	2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan penatausahaan dan verifikasi keuangan (%)	80	90	85	60,614,061									Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara	
		3	25	01	2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan (Laporan)	3	3	3										Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara	

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDAMPAK										UNTUK KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
		URUTAN	KEMAS	PROGRAM	KEGIATAN			SUB KEGIATAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE REGISTRASI PERANGKAT DAERAH			
									TAHUN 2020	TAHUN 2021	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET			(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		3	25	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi BMD Perangkat Daerah (%)	90	90	100	41,400,000									Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara	
		3	25	01	2.03	06	Perencanaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah dokumen (dokumen)	2	2	2	41,400,000								Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara	
		3	25	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kepegawaian Perangkat Daerah (persentase)	100	100	100										Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara	
		3	25	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas (staf pakaian dinas)	0	45	45									Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara	
		3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat (orang)	0	1	1									Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara	
		3	25	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum (%)	80	85	85	139,458,347									Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara	
		3	25	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (%)	80	85	85									Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara	
		3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor (%)	80	85	88	70,544,768								Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara	
		3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan (%)	80	100	100	5,102,091								Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara	
		3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Exemplar)	2100	2100	2100	7,610,908								Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB-KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB-KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
		URUTAN	MOMEN URUTAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN			TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KEBERLAHADAAN PADA AKHIR PERIODE REGISTRASI PERANGKAT DAERAH			
									TAHUN 2022	TAHUN 2023	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		3	25	01	2.06	09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi (kali)	20	25	2100	90,000,000									Dinas Perikanan	Kab. Bangkulu Utara
		3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMED (unit)	0	12	2100	15,786,344									Dinas Perikanan	Kab. Bangkulu Utara
		3	25	01	2.07	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas (unit)	0	1	2100										Dinas Perikanan	Kab. Bangkulu Utara
		3	25	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebel (unit)	0	5	2100										Dinas Perikanan	Kab. Bangkulu Utara
		3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan (unit)	0	6	2100	15,786,344									Dinas Perikanan	Kab. Bangkulu Utara
		3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang (%)	80	100	2100	184,067,767									Dinas Perikanan	Kab. Bangkulu Utara
		3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik (%)	100	100	2100	36,497,767									Dinas Perikanan	Kab. Bangkulu Utara
		3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor (%)	80	100	2100	147,600,000									Dinas Perikanan	Kab. Bangkulu Utara
		3	26	01	2.08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMED (%)	100	100	2100	84,997,000									Dinas Perikanan	Kab. Bangkulu Utara

TUJUAN	SARAN	KODE					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
		URUTAN	MENDAS ULOH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE REGISTRASI PERANGKAT DAERAH			
									TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(%)	TARGET	(Rp)	TARGET	(%)	TARGET	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		3	25	01	2.06	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan perorangan yang dipelihara (%)	100	100	2100	35,000,000									Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara
		3	25	01	2.06	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara (%)	100	100	2100	24,997,000									Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara
		3	25	01	2.06	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (%)	100	100	2100	5,000,000									Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara
		3	25	01	2.06	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara (%)	100	100	2100	20,000,000									Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara
Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya pertumbuhan Produk Perikanan pada sektor perikanan (tangkap, budidaya, olahan dan pemasaran hasil perikanan )	3	26	03			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	1,1	1,3	1,5	30,000,000									Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara
		3	26	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dilakukan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan terkait pengelolaan penangkapan ikan di wilayah perairan umum (kegiatan)	5	7	7	2,000,000									Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET MINERVA PROGRAM DAN KERANGKA PENDASARAN														UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH	LOKASI					
		URUTAN	MOMEN URUTAN	PROGRAM	KEGIATAN			SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI MINERVA PADA AWAL PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH							
									TAHUN 2020	TAHUN 2021	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET			(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)
									6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19	20	21		
		3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Laporan yang tersedia (laporan)	1	1	1											Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara					
		3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Perikanan Tangkap (unit)	0	1	2	1,000,000										Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara					
		3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Perikanan Tangkap (unit)	2	5	5	1,000,000										Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara					
		3	26	03	3.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan nelayan yang handal (%)	62,41	72,99	72,99	28,000,000										Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara					
		3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (nelayan)	150	200	200	28,000,000										Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara					
		3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	Jumlah KUB/koperasi yang terbentuk dan beroperasi (KUB)	78	79	80											Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara					
		3	26	03	2.03		Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase kepuasan nelayan terhadap pelayanan tempat pelelangan ikan (%)	80	85	85											Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara					
		3	25	03	2.03	02	Pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang beroperasi (TPI)	7	9	9											Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara					
		3	26	04			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya (%)	1	1,1	1,1	33,000,000										Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara					

TUJUAN	SASARAN	KODE					TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PEMANGUNG JAWAB	LOKASI				
		URUTAN	KEMUNGKINAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TAHUN 2020	TAHUN 2021	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		3	25	04	2.02	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan (POKQARAN) yang diberdayakan (kelompok)	68	13	13											Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara
		3	25	04	2.02.01	Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	Jumlah Pembudi Daya yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (pembudidaya)	880	130	130											Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara
		3	25	04	2.02.04	Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Jumlah pelaku Usaha perikanan yang mendapatkan pendampingan (pelaku usaha perikanan)	13	15	15											Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara
		3	25	04	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang aktif (kelompok)	147	148	148	33,000,000										Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara
		3	25	04	2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana perikanan Budidaya (unit)	0	1	1	1,000,000									Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara	
		3	25	04	2.04.03	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Sarana perikanan budidaya (unit)	112	12	12	1,000,000										Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara
		3	25	04	2.04.05	Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	Jumlah produksi Benih dan Calon induk ikan (ekor)	Benih Ikan : 100.000 ; Calon Induk : 0	Benih Ikan : 200.00 ; Calon Induk : 0	Benih Ikan : 300.000 ; Calon Induk : 0											Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara

TUJUAN	SASARAN	KOD					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHAP AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENYANGKUT										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE REGISTRASI PENYANGKUT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGKUT JAWAB	LOKASI
		URUTAN	KOD DAERAH	KOD PROGRAM	KOD KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
											TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		3	25	06	2	04	06	Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat	Jumlah dokumen terkait perencanaan dan pengembangan Kawasan Mipropolitan (dokumen)	0	1	1	31,000,000									Dinas Perikanan	Kab. Bangkulu Utara
		3	25	06				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produk Olahan Perikanan (%)	1,5	1,5	2	30,152,646								Dinas Perikanan	Kab. Bangkulu Utara	
		3	25	06	2.01			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan terkait tanda daftar Usaha Hasil Perikanan(rekomendasi)	0	3	3	5,000,000								Dinas Perikanan	Kab. Bangkulu Utara	
		3	25	06	2.01	01		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen usaha pemasaran dan pengolahan Hasil Perikanan (dokumen)	1	1	1	5,000,000								Dinas Perikanan	Kab. Bangkulu Utara	
		3	25	06	2.02			Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan untuk mendefinisikan Pengen Industri Rumah Tangga (rekomendasi)	2	2	2	-								Dinas Perikanan	Kab. Bangkulu Utara	
		3	25	06	2.02	01		Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah pelaku Usaha yang dibina atau diberikan bimbingan/orang	20	25	30									Dinas Perikanan	Kab. Bangkulu Utara	

TUJUAN	SABARAN	KODE				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AJWA. PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENGANTARAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	LOKASI	
		URUTAN	MOMEN URUTAN	PROGRAM	KEGIATAN			SUB KEGIATAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE WENJTRA PERANGKAT DAERAH			
									TAHUN 2020	TAHUN 2021	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET			(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		3	25	06	2.03	Penyediaan dan Penyulunan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan bahan baku ikan segar (laut dan tawar) yang tersedia (N)	3,5	3,5	3,5	25,152,646									Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara	
		3	25	06	2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah konsumsi ikan (perkapita/tahun)	33,25	33,35	33,40	25,152,646									Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara	
		3	25	06	2.03.02	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang diberikan untuk UPT (unit)	8	2	6										Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara	

TUJUAN	BASARAN	KODE				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KEMENDAGRI NOMOR 050-8886 TAHUN 2021										UMT KERJA PERANGKAT DAERAH PENAGUNG JAWAB	LOKASI			
		URUSAN	BIDANG/URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			SUB KEGIATAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE REGISTRASI PERANGKAT DAERAH		
											TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET			(Rp)	TARGET	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
ONAS PERJALAN :										5,515,048,787		5,591,482,908		5,190,497,338		5,450,261,573		27,598,398,370						
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	3	28	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)			100	4,236,694,131	100	4,540,800,445	100	4,888,495,879	100	5,159,095,107	100	22,544,827,187	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara			
		3	28	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah (%)			100	80,743,815	100	79,743,815	100	80,743,815	100	80,743,815	100	393,715,075	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara			
		3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)			1	33,495,175	1	33,495,175	1	33,495,175	1	33,495,175	8	177,473,875	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara		
		3	25	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)			1	3,139,719	2	3,139,719	2	3,139,719	2	3,139,719	10	15,698,393	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara		
		3	25	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)			2	400,000	2	400,000	2	400,000	2	400,000	10	2,000,000	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara		
		3	25	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)			2	1,676,291	2	1,676,291	1	1,676,291	2	1,676,291	10	8,381,451	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara		
		3	25	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)			2	525,600	2	525,600	1	525,600	2	525,600	10	2,628,000	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara		

TUJUAN	SABARAN	KODE				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KEMENDAGRI NOMOR 990-9999 TAHUN 2021										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENAGULING JAWAB	LOKASI		
		URUTAN	BAGIAN	JURUSAN	PROGRAM			KELOMPOK	SUB KEGIATAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025					TAHUN 2026	
												TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)				TARGET	(Rp)
												TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)				TARGET	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (laporan)			1	24,507,036	1	24,507,036	1	24,507,036	1	24,507,036	1	24,507,036	1	172,535,130	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara
		3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)			1	10,000,000	2	10,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	10	61,000,000	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara		
		3	28	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administratif keuangan Perangkat Daerah (%)			100	3,494,117,942	100	3,785,104,516	100	4,154,799,947	100	4,463,399,179	100	19,603,476,368	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara		
		3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/ bulan)			29	3,178,569,521	30	3,716,254,313	31	4,067,989,744	32	4,394,988,075	123	18,662,998,237	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara		
		3	25	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)			2	10,000,000	2	5,616,142	2	5,616,142	2	3,036,141	10	26,908,429	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara		
		3	25	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)			12	60,614,061	12	60,614,061	12	60,614,061	12	60,614,061	60	303,070,305	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara		
		3	25	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/bulanan/bulanan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)			2	3,000,000	2	2,500,000	2	1,500,000	2	2,500,000	20	12,500,000	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara		

TUJUAN	SABARAN	KODE				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENGANAAN KEMENDAGRI NOMOR 050-5865 TAHUN 2021										UMT KERJA PERANGKAT DAERAH PENAGSIUNG JAWAB	LOKASI				
		URUTAN BEKAS URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
									TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)
									8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19		
3	25	01	2.03	01	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Pemenuhan pemenuhan administratif BMD Perangkat Daerah (%)			100	43,400,000	100	43,400,000	100	43,400,000	100	43,400,000	100	217,000,000	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara				
3	25	01	2.03	06	Pertelusuran Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Pertelusuran Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan			2	43,400,000	2	43,400,000	2	43,400,000	2	43,400,000	33	217,000,000	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara				
3	25	01	2.03		Administrasi Kapasitas Perangkat Daerah	Pemenuhan pemenuhan kapasitas Perangkat Daerah (pemenuhan)			100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	218,000,000	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara				
3	25	01	2.05	03	Pengadaan pakat dinas beserta atribut lengkapnya	Jumlah Paket Pakat Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)			45	35,000,000	45	40,000,000	45	22,000,000	45	22,000,000	225	124,000,000	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara				
3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berprestasi Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)			1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	5	100,000,000	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara				
3	25	01	2.04		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan pemenuhan administratif umum (%)			90	154,458,347	90	154,458,347	95	157,458,347	100	157,458,347	100	768,381,715	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara				
3	25	01	2.08	02	Persediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan (paket)			4	15,000,000	5	15,000,000	5	18,000,000	7	18,000,000	16	66,000,000	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara				
3	25	01	2.08	04	Persediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Diadakan (paket)			23	76,544,748	23	76,544,748	23	76,544,748	23	76,544,748	115	582,725,740	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara				
3	25	01	2.08	05	Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Diadakan (paket)			5	5,382,691	5	5,382,691	5	5,102,691	5	5,382,691	25	25,515,455	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara				
3	25	01	2.08	06	Persediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Diadakan (dokumen)			2	7,810,908	2	7,810,908	2	7,810,908	2	7,810,908	2	39,054,540	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara				

TUJUAN	SARAN	KODE				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KEMENDAGRI NOMOR 000-0000 TAHUN 2021										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
		STESIM	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENCANA PERANGKAT DAERAH			
									TAHUN 2020	TAHUN 2021	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)
		3	25	01	2.06	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)			35	50.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000	140	250.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara		
		3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Meubel Daerah Perangin Uluhan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan RMBD (unit)			11	54.879.210	11	38.000.000	11	38.000.000	11	38.000.000	55	184.561.534	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara		
		3	25	01	3.03	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diaudalokan (unit)			1	24.092.846	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	99.291.948	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara		
		3	25	01	3.03	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Diaudalokan (unit)			5	14.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	25	24.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara		
		3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diaudalokan (unit)			5	15.785.364	5	10.000.000	5	20.000.000	5	10.000.000	25	61.572.728	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara		
		3	25	01	3.08		Penyediaan Jasa Perangin Uluhan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa perangin (%)			100	184.097.767	100	184.097.767	100	184.097.767	100	184.097.767	100	925.488.835	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara		
		3	25	01	3.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diaudalokan (laporan)			12	36.497.767	12	36.497.767	12	36.497.767	12	36.497.767	60	162.488.835	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara		
		3	25	01	3.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diaudalokan (laporan)			12	147.600.000	12	147.600.000	12	147.600.000	12	147.600.000	60	718.900.000	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara		
		3	25	01	3.08		Pemeliharaan Barang Meubel Daerah Perangin Uluhan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan RMBD (%)			100	204.997.000	100	204.997.000	100	173.997.000	100	173.997.000	100	842.893.000	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara		
		3	25	01	2.06	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)			2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	175.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara		

TUJUAN	BASARAN	KODE				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KEMENDAGRI NOMOR 950-5889 TAHUN 2021										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB	LOKASI					
		URUSAN	BAGIAN URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI/KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENCANA PERANGKAT DAERAH				
										TAHUN 2020	TAHUN 2021	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET			(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		0	25	01	2.09	02			21	24.997,000	21	24.997,000	21	24.997,000	21	24.997,000	21	24.997,000	21	124.985,000	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara			
		3	25	01	2.09	06			17	5,000,000	18	5,000,000	19	5,000,000	20	5,000,000	21	5,000,000	21	25,000,000	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara			
		3	25	01	2.09	09			6	140,000,000	6	140,000,000	6	129,000,000	6	129,000,000	6	129,000,000	6	518,000,000	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara			
Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan laut/layar perikanan element daerah	Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan laut/layar perikanan element daerah (tangkap, budidaya, akвакуultur dan pemastan hasil perikanan)	3	25	03						549,000,000		548,681,464		425,000,000		428,000,000	2.3	1,813,483,464	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara					
		3	25	03	2.01				10	350,000,000	10	225,000,000	10	225,000,000	10	225,000,000	40	1,077,000,000	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara					
		3	25	03	2.01	01			1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	50,000,000	5	210,000,000	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara					
		3	25	03	2.01	02			2	120,000,000	2	95,000,000	2	95,000,000	3	95,000,000	10	404,000,000	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara					
		3	25	03	2.01	03			5	150,000,000	5	60,000,000	5	60,000,000	7	60,000,000	27	392,000,000	Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara					

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KEMENDAGRI NOMOR 050-5880 TAHUN 2021										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UMT KERJA PERANGKAT DAERAH PERAGOLN 9 JAWAB	LOKASI		
		URUTAN	BEDANG	URUTAN	PROGRAM			KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025					TAHUN 2026	
												TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)				TARGET	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		3	28	03	2.03	Pembelajaran Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan nelayan yang berhasil (%)			84,12	138.000.000	90,58	106.149.600	94,97	120.900.000	100	124.000.000	100	516.149.600	Dinas Perikanan	Kab. Bangkulu Utara			
		3	25	03	2.03	01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang meningkatkan Kapasitasnya (orang)			220	58.000.000	220	60.000.000	230	70.000.000	300	72.000.000	320	200.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Bangkulu Utara			
		3	25	03	2.03	02 Pelaksanaan pelatihan pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Didukung Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (kelompok)			82	80.000.000	84	46.149.500	86	90.000.000	88	52.000.000	90	228.149.500	Dinas Perikanan	Kab. Bangkulu Utara			
		3	28	03	2.03	Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase kepuasan nelayan terhadap pelayanan tempat pelelangan Ikan (%)			85	75.000.000	85	37.531.850	85	80.000.000	85	80.000.000	85	272.531.850	Dinas Perikanan	Kab. Bangkulu Utara			
		3	25	03	2.03	02 Pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (layanan)			7	75.000.000	7	37.531.850	7	80.000.000	7	80.000.000	7	272.531.850	Dinas Perikanan	Kab. Bangkulu Utara			
		3	28	04		Program Pengawasan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)			1,2	428.000.000	1,4	337.000.000	1,7	664.170.428	1,9	603.285.120	1,9	2.482.469.456	Dinas Perikanan	Kab. Bangkulu Utara			
		3	25	04	2.02	Pembentukan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan (POKDIKAWI) yang diberdayakan (kelompok)			15	195.000.000	18	150.000.000	15	150.000.000	21	130.000.000	11	645.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Bangkulu Utara			
		3	25	04	2.02	01 Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Meningkatkan Kapasitas (kelompok)			20	120.000.000	23	70.000.000	30	70.000.000	35	70.000.000	110	130.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Bangkulu Utara			

TUJUAN	BASISAN	KODE				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN ANJAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KEMENDAGRI NOMOR 050-8885 TAHUN 2021										SMT KERJA PEANGKAT DAERAH POKJAGKOR 0 JARAB	LOKASI			
		URUTAN	BAGIAN URUTAN	PROGRAM	KEGIATAN			SUB KEGIATAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		
											TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET			(Rp)	TARGET	(Rp)
		1	25	04	2.02	04	Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok)			20	75.000.000	25	80.000.000	30	80.000.000	35	80.000.000	130	115.900.000	Dinas Perikanan	Kab. Bangkulu Utara		
		1	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kelompok Pembudidayaan Ikan yang aktif (kelompok)			148	431.000.000	151	387.000.000	152	494.120.125	154	453.185.125	154	1.776.405.455	Dinas Perikanan	Kab. Bangkulu Utara		
		1	25	04	2.04	03	Penyediaan Pasaran Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pasaran Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (satu)			4	180.000.000	5	180.000.000	6	190.000.000	7	190.000.000	25	748.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Bangkulu Utara		
		1	25	04	2.04	03	Pengarsinan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (satu)			7	160.000.000	9	201.000.000	11	132.060.163	13	150.389.768	45	144.440.013	Dinas Perikanan	Kab. Bangkulu Utara		
		1	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terpapar Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (dokumen)			1	80.000.000	1	30.000.000	1	72.060.163	1	72.060.163	5	771.120.125	Dinas Perikanan	Kab. Bangkulu Utara		
		1	25	04	2.04	06	Perencanaan, pengembangan, pemantauan dan peningkatan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Ditransmakan, Dikembangkan, Dikonstruksikan dan Ditingkatkan (Ha)			1	31.000.000	1	31.000.000	1	80.000.000	1	43.835.197	5	211.835.197	Dinas Perikanan	Kab. Bangkulu Utara		
		1	25	06			Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Penjualan Produk Olahan Perikanan (%)			2,5	190.152.646	3	125.000.000	3,5	224.535.837	4	224.518.837	4	190.184.946	Dinas Perikanan	Kab. Bangkulu Utara		

TUJUAN	SARAN/IN	KODE				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KEMENDAGRI NOMOR 680-888 TAHUN 2021										UMT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI							
		URUTAN	REKAM LAYANAN	PRODUKSI	KELOMPOK			SUB KEGIATAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH						
											TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET			(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)
											8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20	21		
		1	25	04	2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Perdagangan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan terkait tanda daftar Usaha Hasil Perikanan (rekomendasi)			5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	25	25.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Bangkulu Utara					
		0	25	04	2.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan dan Perdagangan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan dan Perdagangan Hasil Perikanan berdasarkan Perikanan dan Risiko (kolom)			1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	25.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Bangkulu Utara					
		1	25	04	2.02	Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha perikanan dan perikanan skala mikro dan kecil	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan untuk masalah mutu Pangan Industri Rumah Tangga (rekomendasi)			5	40.000.000	5	40.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	25	280.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Bangkulu Utara							
		0	25	04	2.02	Perencanaan lingkungan dan pemetaan persyaratan atau standar pada usaha perikanan dan perikanan skala mikro dan kecil	Jumlah Unit Usaha Perdagangan dan Pemrosesan Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Pemetaan Pemukiman Perumahan Berusaha pada Usaha Perdagangan dan Pemrosesan Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (unit usaha)			7	60.000.000	9	60.000.000	11	70.000.000	13	70.000.000	47	260.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Bangkulu Utara							
		1	25	04	2.03	Penyediaan dan Pencatatan Bahan Baku Industri Perdagangan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengalihan bahan baku ikan segar (satu dan terlar) yang tersedia (%)			1	125.192,648	3	60.000.000	8	148.949,837	12	148.949,837	31	510.184,966	Dinas Perikanan	Kab. Bangkulu Utara							
		1	25	04	2.03	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Perdagangan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Perdagangan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (ton)			286,10	65.132,644	533,24	50.000.000	897,69	60.000.000	444,54	60.000.000	444,54	140.305,292	Dinas Perikanan	Kab. Bangkulu Utara							

TUJUAN	BASARAH	KODE				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KEMENDAGRI NOMOR 090-0000 TAHUN 2021										KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
		URUTAN	URUTAN	URUTAN	URUTAN			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026						
										TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)				TARGET	(Rp)
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12
		3	05	01	2.00	02	Pembinaan fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (pelaku usaha)			15	60.000.000	17	30.000.000	20	28.938.837	21	80.928.837	75	205.875.674	20	Disas Perikanan	21	Kab. Bangkulu Utara

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Keberadaan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara diatur berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 61). Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara adalah Dinas Perikanan Tipe B yang merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perikanan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkulu Utara.

Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara, maka ditetapkan indikator Kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tabel 7.1 sebagai berikut :

TABEL 7.1 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN /INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		KONDISI AWAL TAHUN		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2.5	Kelautan dan Perikanan								
	2.2.5.1	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)	8.00	8.00	8.06	8.12	8.23	8.29	8.34	8.34
	2.2.5.2	Produksi perikanan	36,177.00	36,633.93	37,202.10	37,886.91	38,710.45	39,697.32	40,483.77	40,483.77
		- Tangkap (ton)	6,050.00	6,129.00	6,220.58	6,326.33	6,446.53	6,581.91	6,733.29	6,733.29
		- Budidaya (ton)	14,726.00	14,873.26	15,036.87	15,217.31	15,430.35	15,692.67	15,990.83	15,990.83
	2.2.5.3	Konsumsi Ikan (Kg/Tahun)	33.25	40.66	33.40	33.45	33.50	33.55	33.60	33.60
	2.2.5.4	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	43.03	98.73	57.75	67.28	77.91	88.48	100.00	100.00

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rancangan Akhir perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi misi Kepala Daerah, yang didalamnya terdapat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam periode tahun 2021-2026, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021-2026, serta memperhatikan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu. Penyusunan Rancangan Akhir perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021-2026 juga memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang.

Rancangan Akhir perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026. Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara dan masyarakat berkewajiban untuk melaksanakan program-program pembangunan yang termuat dalam Renstra tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya. Renstra Dinas

Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 telah melibatkan peran pemangku kepentingan dalam upaya menghasilkan Renstra yang dapat menampung aspirasi dari masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun.